



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 66 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Badan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Badan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Badan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Badan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Badan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Badan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Badan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Badan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 66**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok kerja sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022. Renja yang telah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi pedoman Bappeda untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Proses penyusunan Renja terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu:

1. persiapan penyusunan Renja, yang meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renja;
 - b. orientasi mengenai Renja;
 - c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
Penyusunan rancangan awal Renja dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju.
 - b. hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Renstra.

Penyempurnaan rancangan awal Renja dilakukan dengan berpedoman pada rancangan awal RKPD, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

3. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan rancangan Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja. Rancangan Renja dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja;

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja

Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan Perkada tentang RKPD, yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan Renja

Rancangan akhir Renja disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada, setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 menampilkan tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat."

Renja menterjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Renja Bappeda Kabupaten Garut disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Garut, Renstra Bappeda Kabupaten Garut, serta berpedoman pada Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya Renja Bappeda Kabupaten Garut dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Kabupaten Garut yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Garut melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Garut.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
24. Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan

daerah.

Tujuan disusunnya Renja ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.

Bab V Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Bappeda Kabupaten Garut merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Bappeda Kabupaten Garut sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2020 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2020, alokasi anggaran Belanja Daerah untuk Bappeda Kabupaten Garut adalah sebesar Rp.12.699.681.604,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.357.706.054,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.341.975.550,00.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2020, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp.12.170.466.364,00 atau sebesar 95,93% dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.063.504.938,00 atau 95,37%;
- Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.6.106.961.426,00 atau 96,29%.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
							5.01.	PERENCANAAN						
							5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	%	90	90	90	100%
							5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rancangan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	%	100	100	100	100%
4.02.006.0030	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan lingkup Bappeda yang disusun.	dokumen	1	1	100%	5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	dokumen	12	3	3	25%
4.02.006.0001	Penyusunan	Jumlah dokumen	laporan	1	1	100%	5.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah laporan kinerja	laporan	5	1	1	20%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SAKIP lingkup Bappeda yang disusun.						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.					
							5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	%	100	100	100	100%
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	bulan	-	-	-	5.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	tahun	4	1	1	25%
4.02.006.0004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun.	dokumen	4	4	100%	5.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	laporan	18	3	3	17%
							5.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan.	%	90	90	90	100%
4.02.001.0033	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan.	orang	8	8	100%	5.01.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan.	orang	8	8	8	100%
4.02.020.0020	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparat Perencana	Jumlah peserta peningkatan kualitas sumber daya aparat perencana.	orang	5	5	100%								
4.02.005.0001	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pendidikan dan												

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Formal	pelatihan formal.												
4.02.005.0010	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai	Jumlah peserta diklat, kursus, pelatihan, dan peningkatan kapasitas pegawai lainnya.	orang	20	20	100%								
							5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan.	%	90	90	90	100%
4.02.001.0012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam alat-alat listrik dan elektronik yang disediakan.	macam	5	5	100%	5.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	macam	5	5	5	100%
4.02.001.0010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan.	macam	48	48	100%	5.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	macam	48	48	48	100%
4.02.001.0011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	macam	6	6	100%	5.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sesuai kebutuhan.	macam	6	6	6	100%
4.02.001.0015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar yang berlangganan dan pemasangan iklan HUT RI, HJ Garut, Idul Fitri serta Tahun Baru.	jenis	5	5	100%	5.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan surat kabar yang berlangganan dan pemasangan iklan di surat kabar.	jenis	5	5	5	100%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.001.0017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman.	bulan	11	11	100%	5.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi makan dan minum.	orang	24535	5300	5300	22%
4.02.001.0092	Rapat-Rapat Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan luar daerah.	bulan	12	12	100%	5.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah dalam dan luar daerah.	bulan	60	12	12	20%
4.02.001.0094	Rapat-Rapat Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan dalam daerah.												
							5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.	%	90	90	90	100%
4.02.002.0005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan.	unit	5	5	100%	5.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan sesuai kebutuhan.	unit	24	8	8	33%
4.02.002.0012	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah macam sarana dan prasarana peralatan kantor yang	macam	8	8	100%	5.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah macam sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	macam	40	8	8	20%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		diadakan.							diadakan sesuai kebutuhan.					
4.02.002.0068	Penataan Ruang Gedung Kantor	Jumlah penataan ruang gedung kantor.	paket	1	1	100%								
							5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan.	%	90	90	90	100%
4.02.001.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	bulan	12	12	100%	5.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	bulan	60	12	12	20%
4.02.001.0009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis sarana dan prasarana peralatan kantor yang diperbaiki.	jenis	3	3	100%	5.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	jenis	3	3	3	100%
4.02.001.0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor dan alat-alat kebersihan.	paket	2	2	100%	5.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan dan alat-alat kebersihan yang disediakan sesuai kebutuhan.	paket	10	2	2	20%
							5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan.	%	90	90	90	100%
4.02.001.0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan	unit	40	40	100%	5.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya.	unit	221	41	41	19%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	pajak.						Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
4.02.002.0024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala.	unit	55	55	100%	5.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan pemeliharaan rutin/berkala.	unit	121	13	13	11%
4.02.002.0022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	unit	1	1	100%	5.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi.	unit	1	1	1	100%
4.02.002.0042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.	kegiatan	1										
							5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
									Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan.	%	100	100	100	100%
									Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang	%	100	100	100	100%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									disusun sesuai ketentuan.					
							5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan.	%	100	100	100	100%
4.06.016.0018	Tim Percepatan	Jumlah Laporan Fasilitas dan Koordinasi SKPD Pemerintah Kabupaten Garut.	dokumen	4	4	100%	5.01.02.2.01.01.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas dan Koordinasi Perangkat Daerah oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.	laporan	4	4	4	100%
							5.01.02.2.01.02.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						
4.02.021.0014	Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).	laporan	1	1	100%			Jumlah laporan koordinasi keikutsertaan dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).	laporan	5	1	1	20%
4.02.021.0019	Penunjang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional	Jumlah draft usulan program dan kegiatan tahunan lingkup provinsi dan nasional.	laporan	1	1	100%			Jumlah laporan koordinasi keikutsertaan dalam Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.	laporan	5	1	1	20%
4.02.021.0020	Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah pelaksanaan Forum Perangkat	laporan	1	1	100%	5.01.02.2.01.04.	Koodinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Forum	perangkat daerah	75	75	75	100%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Daerah.							Perangkat Daerah.					
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD.	laporan	1	1	100%	5.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						
4.02.021.0009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD								Jumlah Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.	orang	500	100	100	20%
									Jumlah Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD Tingkat Kabupaten.	orang	200	100	100	50%
4.02.021.0088	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah kecamatan yang menyerahkan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan.	laporan	42	42	100%	5.01.02.2.01.06.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sesuai ketentuan.	kecamatan	42	42	42	100%
							5.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
4.02.021.0008	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen Rancangan RKPD yang disusun.	dokumen	3	3	100%			Jumlah dokumen Rancangan RKPD yang disusun sesuai ketentuan.	dokumen	20	4	4	20%
									Jumlah dokumen Rancangan RPJMD yang disusun sesuai ketentuan.	dokumen	6	3	3	50%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Jumlah dokumen Rancangan RPJMD yang ditetapkan sesuai ketentuan.	dokumen	2	1	1	50%
									Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengikuti sosialisasi RPJMD.	orang	600	300	300	50%
4.02.021.0024	Pengelolaan/Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Evaluasi yang dikelola/di-update.	aplikasi	1	1	100%								
		Persentase layanan operasionalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Evaluasi Kinerja.	%	100	100	100%								
4.02.021.0025	Pengelolaan/Updating Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah aplikasi SAKIP yang dikembangkan	aplikasi	1	1	100%								
		Persentase Sistem Informasi	%	90	90	100%								

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.												
							5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai kebutuhan.	%	100	100	100	100%
4.02.015.0008	Garut Satu Data	Jumlah dokumen Updating SPID.	dokumen	1	1	100%	5.01.02.2.02.03.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen updating Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disusun.	dokumen	5	1	1	20%
							5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.	%	100	100	100	100%
							5.01.02.2.03.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						
4.02.021.0087	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen SAKIP Kabupaten Garut yang disusun.	dokumen	8	8	100%			Jumlah dokumen SAKIP Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan.	dokumen	33	7	7	21%
4.02.021.0012	Penyusunan Laporan Keterangan	Jumlah Nota Pengantar dan dokumen LKPJ Bupati	dokumen	2	2	100%			Jumlah Nota Pengantar dan Dokumen LKPJ Bupati Garut yang disusun sesuai	dokumen	10	2	2	20%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pertanggungjawaban (LKPJ)	Garut yang disusun.							ketentuan.					
4.02.021.0013	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	dokumen	3	3	100%	5.01.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.	dokumen	15	3	3	20%
							5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
									Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	%	100	100	100	100%
									Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah	%	100	100	100	100%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Daerah.					
									Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	%	100	100	100	100%
							5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	%	100	100	100	100%
4.02.037.0001	Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	dokumen	1	1	100%	5.01.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	perangkat daerah	53	53	53	100%
4.02.037.0007	Pembinaan Teknis	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Teknis	laporan	1	1	100%	5.01.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi	perangkat daerah	53	53	53	100%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perencanaan Pembangunan kepada Perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Masyarakat	Perencanaan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.						Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.					
4.02.037.0002	Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.	dokumen	1	1	100%	5.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.	perangkat daerah	53	53	53	100%
4.02.037.0006	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Masyarakat	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.	dokumen	1	1	100%								

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.023.0001	Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.	dokumen	1	1	100%	5.01.03.2.01.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	perangkat daerah	8	8	8	100%
4.02.023.0004	Koordinasi Pemecahan Masalah- Masalah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.	dokumen	1	1	100%								#VALUE!
4.02.023.0009	Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan kepada Perangkat daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya.	laporan	1	1	100%	5.01.03.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	perangkat daerah	8	8	8	100%
4.02.023.0005	Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya.	dokumen	1	1	100%	5.01.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	perangkat daerah	8	8	8	100%
4.02.023.0007	Evaluasi dan	Jumlah dokumen	dokumen	1	1	100%								

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya.												
4.02.023.0008	Sinergitas Kabupaten Sehat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Kabupaten Sehat.	laporan	1	1	100%	5.01.03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	perangkat daerah	8	8	8	100%
							5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	%	100	100	100	100%
4.02.022.0002	Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber SDA	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	dokumen	1	1	100%	5.01.03.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	perangkat daerah	7	7	7	100%
4.02.022.0032	Pembinaan Teknis	Jumlah Laporan Pembinaan Teknis	laporan	1	1	100%	5.01.03.2.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi	perangkat daerah	7	7	7	100%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perencanaan Pembangunan kepada Perangkat daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	Perencanaan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.						Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.					
4.02.022.0003	Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	dokumen	1	1	100%	5.01.03.2.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	perangkat daerah	7	7	7	100%
4.02.022.0031	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	dokumen	1	1	100%								#VALUE!
4.02.022.0004	Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen Roadmap Ketahanan Pangan yang disusun.	laporan	1	1	100%	5.01.03.2.02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya	perangkat daerah	7	7	7	100%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Alam.					
							5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	%	100	100	100	100%
4.02.024.0001	Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	dokumen	1	1	100%	5.01.03.2.03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.	perangkat daerah	7	7	7	100%
4.02.035.0002	Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Garut	Jumlah stakeholder yang mengikuti sosialisasi Perda RTRW Kab. Garut.												
4.02.024.0023	Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan kepada Perangkat daerah Lingkup Bidang	Jumlah Laporan Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan	laporan	1	1	100%	5.01.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	perangkat daerah	7	7	7	100%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Wilayah.												
4.02.024.0002	Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Hasil Monitoring Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	dokumen	1	1	100%	5.01.03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	perangkat daerah	7	7	7	100%
4.02.024.0020	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	dokumen	1	1	100%								
4.02.024.0022	Integrated Participatory Development & Management of	Dokumen IPDMIP.	dokumen	1	1	100%	5.01.03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	perangkat daerah	7	7	7	100%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020							Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Target Kinerja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Irigation Program (IPDMIP)								Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.					
4.02.024.0024	Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pusat dan provinsi di Kabupaten/kota	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Pusat dan Provinsi di Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100%								
							5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
							5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.	%	85	85	85	100%
							5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang implementatif.	%	85	85	85	100%
4.06.016.0017	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun dan dikembangkan.	dokumen	1	1	100%	5.05.02.2.04.04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan pelaksanaan pertemuan ilmiah yang diselenggarakan dan seminar ilmiah yang diikuti.	dokumen	5	1	1	20%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan *good governance*, kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan sehingga secara organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut untuk semakin profesional dalam bidang tugasnya. Selama pelaksanaan otonomi daerah, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Garut mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Terselenggaranya proses penyusunan perencanaan pembangunan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dengan partisipasi para pemangku kepentingan yang semakin meningkat;
2. Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta ditunjang dengan data dan informasi yang akurat;
3. Terselenggaranya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal;
4. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan efektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
5. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
6. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perencana pembangunan daerah;
7. Meningkatnya sarana dan prasarana perencanaan pembangunan daerah.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah.	-	-	90%	90%	90%	95%	90%	90%	90%	95%	
4.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif.	-	-	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

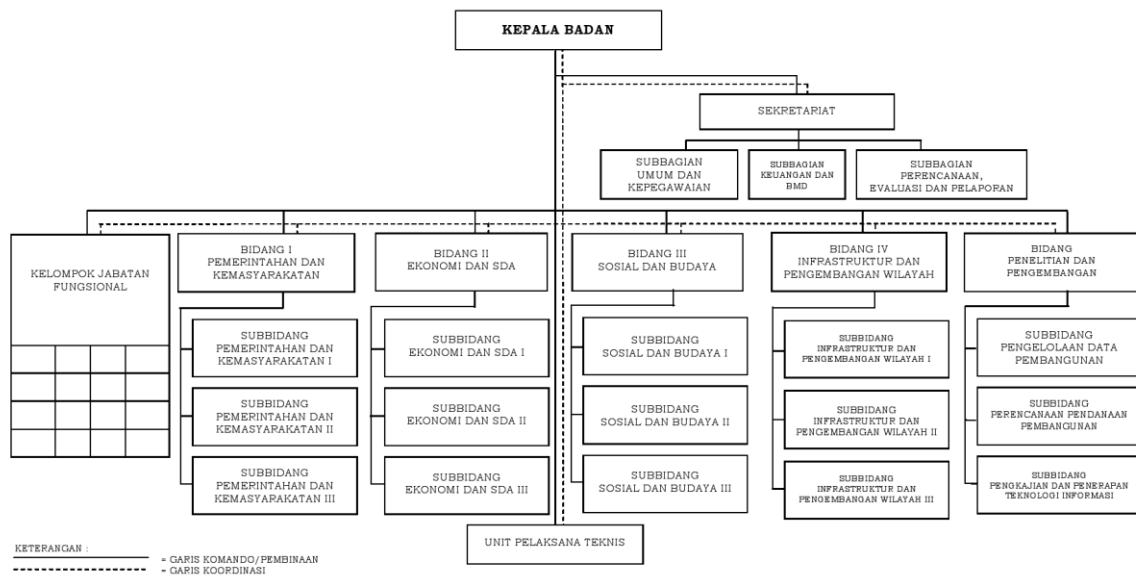
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Susunan dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I;
 2. Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II; dan
 3. Subbidang Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III.
- d. Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I;
 2. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II; dan
 3. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III.
- e. Bidang III Sosial dan Budaya, membawahkan:
 1. Subbidang Sosial dan Budaya I;
 2. Subbidang Sosial dan Budaya II; dan

- 3. Subbidang Sosial dan Budaya III.
- f. Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - 2. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
 - 3. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
 - 2. Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan; dan
 - 3. Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.

Pelaksanaan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan

pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1. Perencanaan
 - a. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan belum optimal;
 - b. Sinkronisasi data perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal;
 - c. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih kurang.
 - d. Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut belum sepenuhnya memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
2. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya;
 - b. Belum sinergi dan selarasnya hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. Kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengembangan masih terbatas.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. mengkoordinasikan para pelaku pembangunan;
2. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
3. melakukan berbagai upaya untuk:

- a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
- c. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan pokok tersebut, maka diidentifikasi beberapa kondisi yang diinginkan sebagai isu strategis dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien yang dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan, antara lain adalah:

1. Perencanaan

- a. Penyelarasan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, dengan ruang lingkup integrasi sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran, kemudahan implementasi tahap perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
- b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang berorientasi hasil/manfaat untuk masyarakat;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- d. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia perencana sesuai kebutuhan ideal;
- e. Implementasi penyelarasan perencanaan antara daerah, provinsi dan pusat serta antar sektor tingkat pemerintahan.

2. Penelitian dan pengembangan

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama serta kualitas perencanaan dan evaluasi program penelitian dan pengembangan;
- c. Peningkatan kebijakan inovasi daerah, fasilitasi inovasi daerah, dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SiDa);

- d. Penguatan basis data dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka review terhadap Rancangan Awal RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan alasan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan yang direncanakan telah sesuai atau tidak sesuai dengan arahan Rancangan Awal RKPD.

Proses perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Pada hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan 1 (satu) kegiatan baru yaitu:
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
2. Pada hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan 8 (delapan) sub kegiatan baru yaitu:
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
 - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
 - 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
 - 5) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan;
 - 6) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
 - 7) Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
 - 8) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
3. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp.16.043.940.360,00 sedangkan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah sebesar

Rp.17.047.225.587,00 maka dapat disimpulkan terdapat penambahan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.1.003.285.227,00.

4. Indikator kinerja program/kegiatan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 masih menggunakan indikator program dan indikator kegiatan hasil pemetaan nomenklatur program/kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke nomenklatur program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program/kegiatan pada Renja Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja program/kegiatan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sehingga tidak lagi menggunakan indikator kinerja program/kegiatan hasil pemetaan.

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2022
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.		10.433.349	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	90 %	10.566.972	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				73.688	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase rancangan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	100 %	81.358	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah rancangan dokumen perencanaan lingkup Bappeda yang disusun.	2 dokumen	56.089	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah rancangan dokumen perencanaan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	2 dokumen	50.010	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan kinerja lingkup Bappeda yang disusun.	1 laporan	17.599	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah laporan kinerja Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	1 laporan	31.348	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.077.693	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	100 %	8.068.340	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	12 bulan	8.023.212	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	1 tahun	8.023.210	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun lingkup Bappeda yang disusun.	3 dokumen	54.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	4 laporan	45.130	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				82.548	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan.	90 %	112.596	
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah tenaga keamanan.	8 orang	82.548	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan.	8 orang	112.596	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				902.944	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan.	90 %	951.258	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah macam alat-alat listrik dan elektronik yang disediakan.	5 macam	17.709	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah macam alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	5 macam	18.543	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan.	48 macam	227.887	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	48 macam	218.448	
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	6 macam	102.984	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sesuai kebutuhan.	6 macam	76.129	
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah surat kabar yang berlangganan dan pemasangan iklan HUT RI, HJ Garut, Idul Fitri serta Tahun Baru.	5 jenis	12.026	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah penyediaan surat kabar yang berlangganan dan pemasangan iklan di surat kabar.	5 jenis	10.364	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman untuk tamu.	11 bulan	131.175	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah tamu yang difasilitasi makan dan minum.	5800 orang	130.500	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan dalam dan luar daerah.	12 bulan	411.162	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah dalam dan luar daerah.	12 bulan	497.274	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				571.406	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.	90 %	557.497	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan.	5 unit	235.345	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan sesuai kebutuhan.	1 unit	307.914	
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah macam sarana dan prasarana peralatan kantor yang diadakan.	8 macam	336.061	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah macam sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sesuai kebutuhan.	8 macam	249.583	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				342.699	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan.	90 %	325.858	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 bulan	199.120	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 bulan	189.982	
2.	Penyediaan Jasa		Jumlah jenis	3 jenis	24.926	Penyediaan Jasa	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong	Jumlah jenis jasa	3 jenis	26.680	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		prasarana peralatan kantor yang diperbaiki.			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kidul Kab. Garut	perbaiki peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.			
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor dan alat-alat kebersihan yang disediakan.	2 paket	118.653	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah jasa tenaga kebersihan dan alat-alat kebersihan yang disediakan sesuai kebutuhan.	2 paket	109.196	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				382.371	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan.	90 %	470.064	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak.	40 unit	31.625	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya.	46 unit	29.500	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara rutin/berkala.	55 unit	123.376	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan pemeliharaan rutin/berkala.	17 unit	114.160	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi.	1 unit	227.370	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi.	1 unit	326.404	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Tingkat ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah.	81 %	2.561.395	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.751.297	
								Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan.	100 %	2.397.419	
								Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.	100 %	353.878	
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				2.181.897	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan.	100 %	2.287.419	
1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut.	4 dokumen	1.140.838	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Perangkat Daerah oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.	4 laporan	1.007.740	
2.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah laporan pelaksanaan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).	1 laporan	195.268	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut			180.597	
								Jumlah laporan	1 laporan	90.440	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								koordinasi keikutsertaan dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).			
								Jumlah laporan koordinasi keikutsertaan dalam Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.	1 laporan	90.157	
3.	Koodinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.	1 laporan	110.000	Koodinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah.	75 perangkat daerah	102.695	
4.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.	1 laporan	284.120	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.	100 orang	286.103	
5.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan.	42 laporan	137.500	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sesuai ketentuan.	42 kecamatan	133.805	
6.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rancangan RKPD yang disusun.	4 dokumen	314.171	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah dokumen Rancangan RKPD yang disusun sesuai ketentuan.	4 dokumen	576.480	
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan				110.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan		Persentase dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	110.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Daerah					Pembangunan Daerah		yang disusun sesuai kebutuhan.			
1.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Updating SIPD.	1 dokumen	110.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah dokumen updating Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disusun.	1 dokumen	110.000	
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				269.499	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.	100 %	353.878	
1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				219.999	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut			301.818	
			Jumlah dokumen SAKIP Kabupaten Garut.	7 dokumen				Jumlah dokumen SAKIP Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan.	6 dokumen	78.359	
			Jumlah Nota Pengantar dan Dokumen LKPJ Bupati Garut.	2 dokumen				Jumlah Nota Pengantar dan Dokumen LKPJ Bupati Garut yang disusun sesuai ketentuan.	2 dokumen	223.459	
2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	4 dokumen	49.500	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai	3 dokumen	52.060	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								ketentuan.			
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase sumber daya aparatur perencana yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.	90 %	2.939.196	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				3.157.173	
								Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100 %	1.249.965	
								Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100 %	643.500	
								Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100 %	1.263.709	
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan				1.301.961	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan		Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan	100 %	1.249.965	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Manusia					Manusia		Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.			
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	100 %							
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial dan Budaya.	100 %							
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	1 dokumen	300.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	53 perangkat daerah	300.000	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah laporan asistensi penyusunan	1 laporan	125.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti	53 perangkat daerah	113.059	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Garut	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.			
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.	2 laporan	175.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.	53 perangkat daerah	175.000	
4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya.	1 dokumen	371.961	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	8 perangkat daerah	331.906	
5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial dan Budaya.	1 laporan	55.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	8 perangkat daerah	55.000	
6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi		Jumlah laporan pelaksanaan	2 laporan	110.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti	8 perangkat daerah	110.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial dan Budaya.			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Garut	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya.			
7.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Kegiatan Kabupaten Sehat.	1 laporan	165.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	8 perangkat daerah	165.000	
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	100 %	643.500	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	100 %	643.500	
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)		Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	1 dokumen	165.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	7 perangkat daerah	165.000	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah laporan asistensi penyusunan	1 laporan	82.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti	7 perangkat daerah	82.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Garut	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.			
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	2 laporan	176.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	7 perangkat daerah	176.000	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	1 laporan	220.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	7 perangkat daerah	220.000	
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang	100 %	993.735	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan	100 %	1.263.709	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Infrastruktur dan Prasarana Wilayah.					Pemerintah Daerah.			
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	1 dokumen	110.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.	4 perangkat daerah	108.513	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	1 laporan	55.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	4 perangkat daerah	50.415	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	2 laporan	264.385	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	4 perangkat daerah	223.717	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi		Jumlah dokumen IPDMIP.	1 dokumen	564.350	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan	4 perangkat daerah	494.836	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.			
5.						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.	3 perangkat daerah	104.815	Sub Kegiatan baru
6.						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	3 perangkat daerah	50.415	Sub Kegiatan baru
7.						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	3 perangkat daerah	137.125	Sub Kegiatan baru
8.						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.	3 perangkat daerah	93.873	Sub Kegiatan baru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase rumusan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.	85 %	110.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.	85 %	571.784	
2.						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan.	100 %	-	Kegiatan dibatalkan
1.						Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah dokumen Feasibility Study (FS) Destinasi Wisata Unggulan yang disusun.	dokumen	-	Sub Kegiatan dibatalkan
3.						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan.	100 %	352.596	Kegiatan baru
1.						Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah dokumen Feasibility Study (FS) Investasi Bahan Baku Komoditas Bambu yang disusun	1 dokumen	200.900	Sub Kegiatan baru
2.						Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun.	1 dokumen	151.696	Sub Kegiatan baru
3.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase rumusan hasil penelitian dan pengembangan yang	85 %	110.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang	87 %	219.188	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			ditindaklanjuti.					implementatif.			
1.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah dokumen Inovasi Daerah yang disusun dan dikembangkan.	1 dokumen	110.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah laporan pelaksanaan pertemuan ilmiah yang diselenggarakan dan seminar ilmiah yang diikuti.	1 dokumen	110.000	
2.						Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	Jumlah dokumen Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Inovasi Daerah.	1 dokumen	80.000	Sub Kegiatan baru
4 17 52					16.043.940					17.047.226	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Bappeda Kabupaten Garut telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk perencanaan tahun 2022 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Bappeda Kabupaten Garut melalui SIPD Kemendagri.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	[NIHIL]				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan bidang perencanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan, maka sebagai kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah turut memperhatikan pula arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingga menghasilkan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana pembangunan tahunan;

Rencana pembangunan jangka panjang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional Tahun 2005-2025 adalah:

"Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur"

Indonesia yang mandiri adalah mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Indonesia yang maju dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, Indonesia yang maju memiliki sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, berkualitas pendidikan yang tinggi, dan produktivitasnya makin tinggi. Berdasarkan indikator kependudukan, Indonesia yang maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, Indonesia yang maju tercermin dari tingginya tingkat pendapatan rata-rata, ratanya pembagian ekonomi, dan

perekonomiannya yang stabil. Dari indikator politik dan hukum, Indonesia yang maju memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Indonesia yang adil dan makmur tercermin pada semua aspek kehidupan. Adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Makmur berarti sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelejen dan kontra-intelejen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara dramatis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara

terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi:

- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- Penegakan Sistem Hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
- Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
- Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
- Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
- Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
- Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, Bappeda Kabupaten Garut menjalankan program dan kegiatan dengan berfokus pada pelaksanaan Misi Ke-6 RPJMN 2020-2024 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Pelaksanaan RPJMN dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat tema:

"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"

Pembangunan pada Tahun 2022 yang menjadi tahun pemulihan ekonomi diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, salah satunya keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*). Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi COVID-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi.

Di sisi lain, reformasi struktural juga diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Reformasi ini terdiri atas Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Perlindungan Sosial, serta Pendudukan dan Keterampilan.

Prioritas Nasional RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sesuai tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Garut berfokus pada pelaksanaan Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik khususnya pada Program Prioritas 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah khususnya pada Indikator 4.5 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B ke Atas SAKIP (%).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Perumusan Tujuan dilakukan dengan memperhatikan pernyataan Visi dan Misi Perangkat Daerah dan pernyataan Tujuan pembangunan jangka menengah dalam dokumen RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Bappeda Kabupaten Garut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Bappeda Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator:
 - a. Nilai SAKIP komponen perencanaan;
 - b. Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan, dengan indikator:
 - a. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Tabel 3.1.
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

Tujuan	Indikator	Target Tahun 2022
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan.	24,25 poin
	Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan jangka menengah daerah.	90%
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.	85%

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Bappeda Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator:
 - a. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD;
 - b. Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD;
 - c. Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah
2. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah, dengan indikator:
 - a. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif.

Tabel 3.2.
 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022
1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD.	100%
	Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD.	100%
	Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah.	90%
2. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif.	85%

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam menyusun rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, Bappeda Kabupaten Garut mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah, sebagaimana yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah:

"Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki

secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah yang merupakan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Bappeda Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan, dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 memprioritaskan pada pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Misi kedua tersebut menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan pelaksanaan operasional tahun ke tiga dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan pembangunan dan keuangan daerah yang

disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Untuk pelaksanaan oleh Bappeda Kabupaten Garut tahun 2022, jumlah program adalah sebanyak 4 (empat) program, jumlah kegiatan adalah sebanyak 17 kegiatan dan jumlah sub kegiatan adalah sebanyak 52 sub kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah terfokus pada lokasi administratif pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Garut yaitu di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

Total rencana kebutuhan dana/pagu indikatif Belanja Langsung untuk mendukung seluruh program/kegiatan Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah sebesar Rp.17.047.225.587,00,00 yang seluruhnya bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Garut.

c. Penjelasan keselarasan rumusan program/kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana telah diuraikan pada Sub Bab 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, hasil analisis kebutuhan dibandingkan dengan Rancangan Awal RKPD dapat disimpulkan bahwa untuk rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 mengalami penambahan sebanyak 1 (satu) kegiatan baru, 8 (delapan) sub kegiatan baru, dan pagu indikatif mengalami penambahan sebesar Rp. 1.003.285.227,00.

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Garut untuk Tahun Rencana 2022 dan prakiraan maju untuk Tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				17.047.225.587,00				18.835.412.195,30
5 01	PERENCANAAN				16.475.442.087,00				18.206.450.345,30
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.		90 %	10.566.971.987,00			90 %	11.623.669.185,30
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rancangan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.		100 %	81.358.100,00	DAU		100 %	89.493.910,00
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	2 dokumen	50.010.200,00	DAU		2 dokumen	55.011.220,00
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	1 laporan	31.347.900,00	DAU		1 laporan	34.482.690,00
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.		100 %	8.068.340.482,00	DAU		100 %	8.875.174.530,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	1 tahun	8.023.210.482,00	DAU		1 tahun	8.825.531.530,00
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	4 laporan	45.130.000,00	DAU		4 laporan	49.643.000,00
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan.		90 %	112.595.932,00	DAU		90 %	123.855.525,00
5 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	8 orang	112.595.932,00	DAU		8 orang	123.855.525,00
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan.		90 %	951.258.373,00			90 %	1.046.384.210,30
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	5 macam	18.543.300,00	DAU		5 macam	20.397.630,00
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	48 macam	218.448.400,00	DAU		48 macam	240.293.240,00
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sesuai kebutuhan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	6 macam	76.128.673,00	DAU		6 macam	83.741.540,30
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan surat kabar yang berlangganan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	5 jenis	10.364.000,00	DAU		5 jenis	11.400.400,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan pemasangan iklan di surat kabar.							
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi makan dan minum.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	5800 orang	130.500.000,00	DAU		5800 orang	143.550.000,00
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah dalam dan luar daerah.	Kab. Garut	12 bulan	497.274.000,00	DAU		12 bulan	547.001.400,00
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.		90 %	557.497.450,00			90 %	613.247.195,00
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan sesuai kebutuhan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	1 unit	307.914.000,00	DAU		5 unit	338.705.400,00
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah macam sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sesuai kebutuhan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	8 macam	249.583.450,00	DAU		8 macam	274.541.795,00
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan.		90 %	325.857.650,00			90 %	358.443.415,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	12 bulan	189.981.600,00	DAU		12 bulan	208.979.760,00
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	3 jenis	26.680.000,00	DAU		3 jenis	29.348.000,00
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan dan alat-alat kebersihan yang disediakan sesuai kebutuhan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	2 paket	109.196.050,00	DAU		2 paket	120.115.655,00
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan.		90 %	470.064.000,00			90 %	517.070.400,00
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	46 unit	29.500.000,00	DAU		47 unit	32.450.000,00
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan pemeliharaan rutin/berkala.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	17 unit	114.160.000,00	DAU		18 unit	125.576.000,00
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	1 unit	326.404.000,00	DAU		1 unit	359.044.400,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dilaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi.							
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.751.297.100,00				3.026.426.810,00
		Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan.		100 %	2.397.419.100,00			100 %	2.637.161.010,00
		Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.		100 %	353.878.000,00			100 %	389.265.800,00
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan.		100 %	2.287.419.300,00			100 %	2.516.161.230,00
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Perangkat Daerah oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	4 laporan	1.007.740.000,00	DAU		4 laporan	1.108.514.000,00
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut		180.596.800,00	DAU			198.656.480,00
		Jumlah laporan koordinasi keikutsertaan dalam		1 laporan	90.439.800,00			1 laporan	99.483.780,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).							
		Jumlah laporan koordinasi keikutsertaan dalam Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.		1 laporan	90.157.000,00			1 laporan	99.172.700,00
5	01 02 2.01 04	Koodinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	75 perangkat daerah	102.695.000,00	DAU		75 perangkat daerah	112.964.500,00
5	01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	100 orang	286.102.700,00	DAU		100 orang	314.712.970,00
5	01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	42 kecamatan	133.804.800,00	DAU		42 kecamatan	147.185.280,00
5	01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		4 dokumen	576.480.000,00	DAU		4 dokumen	634.128.000,00
5	01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	109.999.800,00			100 %	120.999.780,00
		Persentase dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai kebutuhan.							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen updating Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disusun.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	1 dokumen	109.999.800,00	DAU		1 dokumen	120.999.780,00
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.		100 %	353.878.000,00			100 %	389.265.800,00
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut		301.818.000,00	DAU			331.999.800,00
		Jumlah dokumen SAKIP Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan.		6 dokumen	78.359.000,00			6 dokumen	86.194.900,00
		Jumlah Nota Pengantar dan Dokumen LKPJ Bupati Garut yang disusun sesuai ketentuan.		2 dokumen	223.459.000,00			2 dokumen	245.804.900,00
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	3 dokumen	52.060.000,00	DAU		3 dokumen	57.266.000,00
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				3.157.173.000,00				3.556.354.350,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.		100 %	1.249.964.500,00			100 %	1.413.096.600,00		
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.		100 %	643.500.000,00			100 %	707.850.000,00		
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.		100 %	1.263.708.500,00			100 %	1.435.407.750,00		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen		100 %	1.249.964.500,00	100 %	1.413.096.600,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
		perencanaan Pemerintah Daerah.													
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	53	perangkat daerah	300.000.000,00	DAU		53	perangkat daerah	325.000.000,00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	53	perangkat daerah	113.058.500,00	DAU		53	perangkat daerah	150.000.000,00
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	53	perangkat daerah	175.000.000,00	DAU		53	perangkat daerah	210.000.000,00
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	8	perangkat daerah	331.906.000,00	DAU		8	perangkat daerah	365.096.600,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	8 perangkat daerah	55.000.000,00	DAU		8 perangkat daerah	60.500.000,00
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	8 perangkat daerah	110.000.000,00	DAU		8 perangkat daerah	121.000.000,00
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	8 perangkat daerah	165.000.000,00	DAU		8 perangkat daerah	181.500.000,00
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.		100 %	643.500.000,00			100 %	707.850.000,00
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	7 perangkat daerah	165.000.000,00	DAU		7 perangkat daerah	181.500.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.							
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	7 perangkat daerah	82.500.000,00	DAU		7 perangkat daerah	90.750.000,00
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	7 perangkat daerah	176.000.000,00	DAU		7 perangkat daerah	193.600.000,00
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	7 perangkat daerah	220.000.000,00	DAU		7 perangkat daerah	242.000.000,00
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras		100 %	1.263.708.500,00			100 %	1.435.407.750,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.							
5	01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	4 perangkat daerah	108.513.000,00	DAU		4 perangkat daerah	120.000.000,00
5	01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	4 perangkat daerah	50.415.000,00	DAU		4 perangkat daerah	65.000.000,00
5	01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	4 perangkat daerah	223.717.000,00			4 perangkat daerah	246.088.700,00
5	01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	4 perangkat daerah	494.835.500,00	DAU		4 perangkat daerah	544.319.050,00
5	01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong	3 perangkat daerah	104.815.000,00	DAU		3 perangkat daerah	110.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.	Kidul Kab. Garut						
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	3 perangkat daerah	50.415.000,00	DAU		3 perangkat daerah	65.000.000,00
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	3 perangkat daerah	137.125.000,00	DAU		3 perangkat daerah	165.000.000,00
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	3 perangkat daerah	93.873.000,00	DAU		3 perangkat daerah	120.000.000,00
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				571.783.500,00				628.961.850,00
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.		85 %	571.783.500,00			85 %	628.961.850,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan.		100 %	-			100 %	-
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen Feasibility Study (FS) Destinasi Wisata Unggulan yang disusun.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	-	-			-	-
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan.		100 %	352.596.000,00			100 %	387.855.600,00
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen Feasibility Study (FS) Investasi Bahan Baku Komoditas Bambu yang disusun	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	1 dokumen	200.900.000,00	DAU		1 dokumen	220.990.000,00
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	1 dokumen	151.696.000	DAU		1 dokumen	166.865.600,00
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang implementatif.		85 %	219.187.500,00			85 %	241.106.250,00
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Aplikasi SIM Surat dan Pengarsipan yang dikembangkan.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	1 dokumen	29.187.500,00	DAU		1 dokumen	32.106.250,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan pelaksanaan pertemuan ilmiah yang diselenggarakan dan seminar ilmiah yang diikuti.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	1 dokumen	110.000.000,00	DAU		1 dokumen	121.000.000,00
5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Inovasi Daerah.	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	1 dokumen	80.000.000,00	DAU		1 dokumen	88.000.000,00
					17.047.225.587,00				18.835.412.195,30

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Bappeda Kabupaten Garut adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Bappeda Kabupaten Garut. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022 menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	17.047.225.587,00
5.01.	PERENCANAAN	16.475.442.087,00
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.566.971.987,00
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.358.100,00
5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.010.200,00
5.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.347.900,00
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.068.340.482,00
5.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.023.210.482,00
5.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.130.000,00
5.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	112.595.932,00
5.01.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	112.595.932,00
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	951.258.373,00
5.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.543.300,00
5.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218.448.400,00
5.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.128.673,00
5.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.364.000,00
5.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	130.500.000,00
5.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	497.274.000,00
5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	557.497.450,00
5.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.914.000,00
5.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	249.583.450,00
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.857.650,00
5.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.981.600,00
5.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.680.000,00
5.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.196.050,00
5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.064.000,00
5.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.160.000,00
5.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	326.404.000,00
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.751.297.100,00
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.287.419.300,00
5.01.02.2.01.01.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.007.740.000,00
5.01.02.2.01.02.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	180.596.800,00
5.01.02.2.01.04.	Koodinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	102.695.000,00
5.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	286.102.700,00
5.01.02.2.01.06.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	133.804.800,00
5.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	576.480.000,00
5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	109.999.800,00
5.01.02.2.02.03.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	109.999.800,00
5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	353.878.000,00
5.01.02.2.03.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	301.818.000,00
5.01.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	52.060.000,00
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.157.173.000,00
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.249.964.500,00
5.01.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000,00
5.01.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	113.058.500,00
5.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	175.000.000,00
5.01.03.2.01.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	331.906.000,00
5.01.03.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	55.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	110.000.000,00
5.01.03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	165.000.000,00
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	643.500.000,00
5.01.03.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	165.000.000,00
5.01.03.2.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	82.500.000,00
5.01.03.2.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	176.000.000,00
5.01.03.2.02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	220.000.000,00
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.263.708.500,00
5.01.03.2.03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	108.513.000,00
5.01.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.415.000,00
5.01.03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	223.717.000,00
5.01.03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	494.835.500,00
5.01.03.2.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.815.000,00
5.01.03.2.03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50.415.000,00
5.01.03.2.03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	137.125.000,00
5.01.03.2.03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	93.873.000,00
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	571.783.500,00
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	571.783.500,00
5.05.02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-
5.05.02.2.02.05.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	352.596.000,00
5.05.02.2.03.02.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	200.900.000,00
5.05.02.2.03.04.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	151.696.000,00
5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	219.187.500,00
5.05.02.2.04.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	29.187.500,00
5.05.02.2.04.04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	110.000.000,00
5.05.02.2.04.05.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	80.000.000,00
	JUMLAH	17.047.225.587,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-tiga dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Bappeda Kabupaten Garut untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2022.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN